

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2015 Kecamatan Harau Dalam Angka Tahun 2015. CV. Rizky Utama. Payakumbuh.
- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- [Permenkeu] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah an arang/Jasa Pemerintah
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- [PP] Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- AAMCoG, 2012. Pedoman Sistem Terpadu Pengelolaan Aset yang Strategis, <http://www.aamcog.com/wp-content/uploads/2011/08/Guide-to-Integrated-Strategic-Asset-Management-Indonesian-Version.pdf>, diakses tanggal 13 Juli 2013.
- Adimiharja, K dan Hikmat. H. 2001. Participatory Research Appraisal. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
- Bayu, S. 1981. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Bina Aksara.
- Bertovic, H., O. Kaganova., dan J. Rutledge. 2002. *Asset Management Model for Local Government Reform Project (LGRP)*. The Urban Institute. Usaid.

- Britton, .C.C. 2008. <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/07/hukum-administrasinegara.html>. diakses 20 Maret 2016.
- Budisusilo, S. 2005. Penilaian dan Pengelolaan Aset Daerah Dalam Pembangunan Daerah Seminar Nasional MEP UGM [Makalah]. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kwantitatif. Yogyakarta. Gajah Mada Press.
- Chair, A. 2001. Peranan Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kegunaan Aset Tanah dan Bangunan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Pemda DKI Jakarta) [Tesis]. Yogyakarta. Program Pascasarjana UGM.
- Dyckman, Thomas R., Ronald E. Dukes dan Charles J. Davis. 2001. Akuntansi Inetrmediate. Edisi ketiga. Jilid Satu. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Hadi, S. 1985. Metodologi research jilid II. Fakultas Psikologi UGM. Jogjakarta.
- Halim, A. 1997. Analisa Laporan Keuangan. Yokyakarta. AMP YKPN.
- Jumingan .2006. Analisis laporan Keuangan. Jakarta .Bumi Aksara.
- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kolinug, M. S. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon_Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015
- Luthfi, Y. U. 2015. Identifikasi Promosi Kesehatan Menggunakan Metode Clustering Di Provinsi Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UMS. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2003. Analisis Efektifitas Majaemen Aset Properti Rill Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2001/2002). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 4 (02) : 1-9
- Maleong. 2007. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung. CV Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Ghalia. Jakarta.
- Pakiding, Y. 2006. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) [Tesis]. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- Salim. 2006. Teori dan Paradigma Sosial. Yogyakarta. Tiara Wacana
- Satriyanto, E. 2011. Clustering. Institut Teknologi Surabaya. Surabaya.
- Siregar, D. D. 2004. Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama..

- Sitorus, F. dan I.H. Agusta. 2004. Metodologi Kajian Komunitas. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Ilmu Pertanian Institut Pertanian Bogor dan Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soegiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Soegiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta.
- Soegiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Bandung. Alfabeta..
- Soekamto, S dan Mamuji, S. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Rajawali Press.
- Sugiyama, A. G. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Guardaya Intimarta. Bandung.
- Sumardjo dan Saharudin. 2006. Tajuk Modul EP-523 : Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Terry, G.R. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [Warren](#) C. S., P.E. [Fess](#)., dan [J. Reeve](#). 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat.
- Wiratha. M. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta. Andi offset.
- Wiratha. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta. Andi Ofset.

